

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PUTUSNYA IKATAN  
PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN INDONESIA YANG  
MELANGSUNGKAN PERKAWINAN CAMPURAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**Dewi Saraswati Permata Suri**

**Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap perempuan Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan laki-laki Warga Negara Asing sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan akibat hukum yang timbul dari putusnya perkawinan akibat perceraian bagi perempuan Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan masalah secara yuridis normatif terhadap data yang diperoleh dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan perundang-undangan, literatur- literatur dan survey kepustakaan. Diperoleh kesimpulan bahwa bila terjadi perceraian maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri dan harta bawaan dari masing-masing suami isteri begitu pula dengan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya, dengan berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 ditentukan bahwa anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin, maka ia harus menentukan kewarganegaraan pilihannya yang harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

**Kata kunci :** Perlindungan Hukum, Perempuan, Perkawinan Campuran.

# **THE LEGAL PROTECTION IN MIXED MARRIAGES REGARDING DIVORCE FOR INDONESIAN WOMEN IN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGES**

**Dewi Saraswati Permata Suri**

## ***Abstract***

*This research talks about the legal protection for Indonesian women who married to male foreigners in accordance with Law Number 1 of 1974 and its cause of action that emerge from the marital breakup caused by divorce for Indonesian women that undergoes a mixed marriage in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning marriages. This research uses normative legal research methods by approaching the issue in juridical normative to the data that was achieved and compiling the data using laws, literatures and library survey to the data being said. The conclusion being obtained is that if a divorce happens the wealth that was obtained during the marriage becomes a joint custody and their congenital treasures also the presents, and materials that were handed down to them are under the supervision of their respective so long as they do not choose otherwise. Next, with the validity of the Law Number 12 of 2006 determined that the children that has dual citizenship may choose their citizenship in a maximum of 3 years after they turn 18 years old or married.*

**Keywords:** *Legal Protection, Women, Mixed Marriages*